

Urgensi Konvensi Capres Partai Demokrat

[Jagat Opini](#)

23 May 2013 10:02



JAGAT OPINI---Oleh: Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum---

Kurang dari sebulan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali awal maret 2013 ini, Partai Demokrat telah mempertimbangkan dan mengutarakan gagasan adanya konvensi calon presiden 2014. Gagasan ini untuk pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat yang sekaligus Presiden RI SBY. Gagasan SBY ini disampaikan ketika menerima ketua DPD RI, Irman Gusman pada tanggal 10 April yang membicarakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewenangan DPD.

Ada beberapa alasan yang menurut penulis melatar belakangi mengapa SBY mengemukakan ide konvensi tersebut, antara lain: **Pertama**, kita ketahui bersama bahwa Tahun 2014 SBY secara legal sudah tidak memungkinkan untuk maju sebagai presiden pada tahun tersebut, sementara kondisi riil dalam PD belum ada tokoh selevel SBY yang layak dan kredibel untuk dijagokan PD sebagai pengganti SBY;

Kedua, ide konvensi digunakan sebagai upaya untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas Partai Demokrat yang dalam survey terakhir diketahui bahwa elektabilitas PD terjun bebas hanya 8 persen. Dengan tawaran konvensi diharapkan elektabilitas PD naik mendekati atau bahkan meningkat sampai 20 persen seperti kemenangan kedua tahun 2009 lalu;

Ketiga, dengan konvensi maka Partai Demokrat akan dapat mengambil simpati publik manakala sistem konvensi dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Harapannya tentu saja "proses mengorbankan" masyarakat ini sebagai upaya meningkatkan popularitas PD;

Keempat, dengan konvensi maka Partai Demokrat akan mendapat tokoh baik di dalam partai maupun di luar partai yang kredibel, kompeten, integritas, dan moral;

Kelima, konvensi merupakan cara yang cerdas untuk menarik tokoh-tokoh potensial di luar partai politik yang tidak mempunyai kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden.

Menengok Ke Belakang

Ide dan gagasan SBY soal konvensi calon presiden 2014 dari PD tersebut mengingatkan kita pada sistem pemilihan calon Presiden di Amerika Serikat setiap empat tahun sekali, tepatnya pada bulan Mei-Juni baik partai Demokrat maupun Partai Republik melakukan polling atau penjangjangan kepada masyarakat untuk memilih tokoh yang layak diusung sebagai calon presiden dari Partai Demokrat maupun Partai Republik agar diusung sebagai kandidat presiden yang mewakili partai dan dipilih secara langsung oleh rakyat pada bulan November.

Di Indonesia, sistem konvensi telah berjalan sejak awal reformasi (tepatnya pada tahun 2004) dimana Partai Golongan Karya mencoba mendongkrak elektabilitas partai turun drastis sebagai akibat dari stigma Partai Golkar sebagai penyokong utama Soeharta pada masa Orde Baru.

Konvensi Partai Golkar yang pada waktu itu diikuti oleh Akbar Tandjung (Ketua Umum Partai Golkar waktu itu), Wiranto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Prabowo Subianto, dan memunculkan Wiranto sebagai pemenang konvensi. Konvensi yang dilakukan oleh Partai Golkar kala itu merupakan bentuk konvensi secara internal, karena diikuti oleh orang-orang dalam Partai Golkar dan hak pemilih berada pada pengurus/atau utusan dari cabang, daerah, maupun pusat dari partai tersebut.

Pertanyaan publik kini muncul, apakah Partai Demokrat akan mengikuti pola Partai Golkar? Rupanya ide konvensi dari Partai Demokrat itu berbeda jika dibandingkan dengan Partai Golkar. Hal itu setidaknya menurut Syarif Hassan - Ketua Harian DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat akan melaksanakan konvensi semi terbuka (primary convention) dimana semua pendaftar diserahkan pada tim bentukan SBY dengan menyusun sebuah aturan main akan konvensi itu.

Setali tiga uang, Ketua Departemen Ekonomi DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga menyatakan bahwa konvensi Partai Demokrat bersifat semi terbuka, dimana semua orang berhak ikut serta baik dari dalam partai atau luar partai.

Dengan memperhatikan kondisi riil tersebut maka ada beberapa hal yang diperhatikan sebagai persiapan rencana konvensi PD tersebut, antara lain:

Pertama, mengumumkan secara formal dan terbuka kepada publik tentang persyaratan (baik calon dari dalam maupun luar partai). **Kedua**, cara melakukan konvensi apakah langsung maupun tidak langsung, dan **Ketiga**, siapa yang bisa memilih, apakah langsung maupun tidak langsung melibatkan masyarakat sebagai pemilih serta keempat adanya jaminan bahwa pemenang konvensi akan diusulkan disupport oleh partai sebagai Calon Presiden 2014.

Beberapa hal perlu dipersiapkan itu penting diinformasikan karena belajar dari konvensi Partai Golkar kala itu, dimana pemenang konvensi ternyata kurang dapat dukungan dari pemilih (karena mungkin hak memilih kala itu bukan rakyat akan tetapi pengurus/ketua pengurus Cabang, Wilayah dan Pusat) dan kurang didukung oleh internal partai karena masih ada faksi-faksi di dalam partai yang belum bisa menerima hasil konvensi.

Oleh karena itu pola konvensi PD sebaiknya melibatkan dan dapat diikuti oleh peserta di dalam partai, misalnya Marzuki Alie, Syarif Hasan, Jero Wacik, Saan Mustafa, dan lain-lain, serta tokoh yang berasal dari luar partai baik sipil maupun militer, misalnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK- Moh Mahfud MD, Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Kepala staf Angkatan Darat - Jenderal Pramono Edhi Wibowo, Menteri Perdagangan- Gita Wiryawan, Ketua DPD- Irman Gusman , Gubernur DKI Joko Widodo- Gubernur DKI , Ketua Partai Nasdem- Surya Paloh dan Ketua dewan pakar Partai Hanura yang juga CEO MNC group- Hary Tanoesudibyo, dan lain-lain.

Sedang pemilihnya adalah masyarakat seluruh Indonesia, melalui polling hasil survey dengan melibatkan lembaga lembaga survey yang independen, kredibel, dan mempunyai pengalaman serta akuntabel. Pemenang atau tiga besar pemenang lalu diajukan ke DPP PD atau Majelis Tinggi Partai atau Dewan Pertimbangan Partai dan peserta yang dipilih tersebut dijadikan sebagai calon resmi sbg Capres PD 2014.

Mengakhiri tulisan ini, konvensi Partai Demokrat merupakan cara cerdas dan jitu untuk memilih calon calon presiden dari PD tahun 2014 dengan melibatkan tokoh tokoh potensial, kredibel, berintegritas dan kompeten baik didalam maupun diluar partai dengan melibatkan masyarakat. Semoga ide konvensi itu bukan merupakan cara akal akalan dan bukan basa- basi politik untuk meningkatkan elektabilitas dan image partai serta untuk kepentingan pencitraan dalam rangka mendongkrak popularitas partai. (*****Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sbelas Maret Surakarta / Pembantu Rektor II UNS Solo**)